

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku/Jurnal/Disertasi:

- Andi Hamzah, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi), Jakarta Rineka Cipta, hlm 106.
- A. Mukthie Fadjar. 2004. Tipe Negara Hukum. Malang, Jawa Timur. Bayumedia Publishing.
- Aziz Syamsuddin, Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang, cet.2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Anton Muliono, 1998, Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Burkhardt Krems seperti dikutip A Hamid S Attamimi dalam Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Disertasi, (Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990).
- Imer B. Flores, "Legisprudence, The Role and Rationality of Legislators –Vis a Vis Judges Towards The Realization of Justice", Mexican Law Review, New Series Volume 1, Number 2, 2009.
- Irawan Soejito, Teknik Membuat Undang-Undang, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1988).
- Jimly Assiddiqie, Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945. Makalah Disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII dengan Tema Penegakan Hukum Dalam Pembangunan Berkelanjutan. Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, Bali, 14-18 Juli 2003.
- Jimly Asshiddiqie. 2010. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta Timur. Sinar Grafika.
- Kartasasmita, Ginandjar, 1996. Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan, Jakarta : Pustaka CIDESINDO.

- Lamintang, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- M. Kamal Hidjaz, 2007, Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Sulawesi Selatan, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Hassanuddin, Makassar.
- Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, (Yogyakarta: Kanisius, 2007).
- Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis) Penerbit Alumni, Bandung, 2002.
- Muhammad Alim Abadi, 2009 Tinjauan Yuridis Pembatalan Peraturan Daerah (Studi Kasus Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Perizinan Usaha Perikanan dan Hasil Tangkapan Ikan), Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNHAS, Makassar.
- Moeljatno. 2002. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bandung. Rineka Cipta.
- M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Padmo Wahjono. 1989. Pembangunan hukum di Indonesia. Jakarta, ind-hill co.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta. Penerbit Kencana Prenada Media Grup.
- Philipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya. PT. Bina Ilmu.
- Prodjodikoro. 2000. Penegakan Hukum Lalu Lintas. Jakarta. Pustaka Media.
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, cet.10 (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Sudago Gaotama, 1985, HUKUM Perdata Internasional, Alumni Bandung.

VCRAC Crabbe, Legislative Drafting, (London: Cavendish Publishing Limited,) 1994.

Victor Imanuel W. Nalle, 2016, Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban Dan Ketentraman Di Kabupaten Sidoarjo, Jurnal Hukum & Pembangunan 47 No. 3.

Yulies Tina Masriani, 2004. Pengantar Hukum Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta.

2. Website:

A.A. Oka Mahendra. 2010. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta. Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan. Dipublikasikan pada 29 Maret 2010, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id> diakses pada tanggal 18 May 2020 13:14:17 GMT.

Heru Agung Santoso, Kabupaten Pulau Morotai dalam Angka 2020, <https://morotaikab.bps.go.id>, hal.5, diakses pada tanggal 21 September 2020 Pukul: 09.45.WIT.

Otong Rosadi, 2009, Memajukan Kesejahteraan Umum Amanah Kostitusiona <http://tebarkasih.blogspot.com/2009/08/artikel-memajukan-kesejahteraan-umum.html>, diakses pada tanggal 18 May 2020 12:57:36 GMT

Saiful Bahri, "Dasar-Dasar Penyusunan Peraturan Perundang-undangan", hlm.1. <http://www.legalitas.org/database/artikel/htn/dasar2.pdf>. diakses 28 Februari 2011.

3. Referensi Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Ternate;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan peraturan pelaksanaannya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Bantuan Hukum;

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Bantuan Hukum;

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-HN.03.03-42 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Permohonan Bantuan Hukum Dan Pencairan Anggaran Bantuan Hukum;

Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 04 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat;

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Nomor 6 Tahun 2023 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.